

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Desa Pangden Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara

Jenianti ^{1*}, Putriana Kristanti ²

^{1,2} Universitas Kristen Duta Wacana, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

Email: 12210658@students.ukdw.ac.id ^{1*}, putrianak@staff.ukdw.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 4 Juni 2025; Diterima dalam bentuk revisi 30 Juni 2025; Diterima 10 Juli 2025; Diterbitkan 1 Agustus 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Jenianti, & Kristanti, P. (2025). Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Desa Pangden Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2517-2524. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4430>.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kinerja aparatur pemerintah desa Pangden yang berada di Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara dipengaruhi oleh penerapan *good governance*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan smartPLS 4. Dengan nilai t-statistik transparansi sebesar 3,319 dan nilai P sebesar 0,001 serta nilai t-statistik aturan hukum sebesar 3,457 dengan nilai p sebesar 0,001, maka dari hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara transparansi dengan aturan hukum terhadap kinerja aparatur Desa Pangden Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara. Sementara akuntabilitas dan partisipasi memiliki dampak negatif terhadap kinerja yang besar, dikarenakan hal tersebut akuntabilitas kemungkinan kurangnya adanya informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kemungkinan menyebabkan kesalahan, sehingga ada atau tidaknya akuntabilitas keuangan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat. Sedangkan Partisipasi kemungkinan masyarakat berpartisipasi secara nyata melalui ide maupun gagasan itu, namun tingkat partisipasi masyarakat kurang dalam memanfaatkan hasil dan evaluasi sehingga dinilai cukup optimal.

Kata Kunci: Good Governance; Kinerja Aparatur; Pemerintah Desa.

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the extent to which the performance of the Pangden village government apparatus, Tikala District, North Toraja Regency is influenced by the implementation of *good governance*. This research is a quantitative study. The sampling technique used is purposive sampling. The data analysis used in this study is multiple linear regression using smartPLS 4. With a transparency t-statistic value of 3.319 and a P value of 0.001 and a legal rule t-statistic value of 3.457 with a p value of 0.001, the results of the analysis and testing concluded that there is a positive and significant influence between transparency and legal rules on the performance of the Pangden Village apparatus, Tikala District, North Toraja Regency. While accountability and participation have a negative effect on large performance, because of this accountability, there is a lack of financial information provided by the government to the public which can cause errors, so that the presence or absence of financial accountability does not affect public trust. While participation means that the community can play a real role through ideas or concepts, the level of community participation is still lacking in utilizing results and evaluations, so it is considered less than optimal.

Keyword: Good Governance; Apparatus Performance; Village Government Competence.

1. Pendahuluan

Pemerintah mempunyai peran yang signifikan dalam program pelayanan dan kebijakan bagi masyarakatnya untuk membangun kesejahteraan. Dengan menerapkan tata kelola yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada faktor ekonomi saja, namun dapat melihat keinginan dan ambisi masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan sejahtera, pelayanan publik yang berpegang pada prinsip-prinsip *good governance* sangatlah penting. Melalui penerapan *good governance*, masyarakat mempunyai hak untuk menuntut pemerintah memberikan pelayanan dan kinerja yang berorientasi pada kepentingan publik dan agar organisasi pemerintah memberikan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, selain diperlukan, tata pemerintahan yang baik merupakan langkah yang diperhitungkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif serta berfokus pada kebutuhan masyarakat. Menurut (Putra Pratama *et al.*, 2024). korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan adalah beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang menghalangi negara ini untuk menerapkan tata kelola yang baik secara maksimal. Kondisi pelayanan seperti ini turut berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya korupsi di pemerintahan, sumber daya menjadi tidak berkualitas, dalam kinerja pemerintahan seringkali terdapat anomali dan tindakan tidak efektif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat penting untuk membangun kualitas kinerja aparatur. Kurangnya sumber daya manusia di pemerintahan sangat umum terjadi di Indonesia. Permasalahan ini muncul karena kurangnya informasi mengenai sistem keuangan dan pekerjaan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, yang menyebabkan kinerja pegawai pemerintah di bawah standar dalam melayani masyarakat. Karena tata kelola pemerintahan yang baik adalah pembangunan dan arah pemerintahan, maka hal ini merupakan salah satu permasalahan dalam refleksi pemerintah terhadap sumber daya manusia, yang semuanya merupakan instrumen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 menyatakan (Putra Pratama *et al.*, 2024). AccTentang evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Kinerja menjadi tujuan evaluasi yang tidak memihak terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk mengetahui tingkat kinerjanya, penting bagi pemerintah desa untuk melakukan evaluasi kinerja. Peraturan Dari segi produktivitas kinerja, Kinerja Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 termasuk tinggi bagi seorang pejabat dan sebaliknya (Putra Pratama *et al.*, 2024).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan antara kinerja resmi dan pemerintah dengan penerapan *good governance*. Pada tahun 2019, Nurbaeti dan Nugraha dalam (Ni'matin Nada & Khoirawati, n.d.) menyiratkan bahwa ada korelasi yang kuat antara kedua faktor ini dan kinerja. Terkait dengan seberapa baik pejabat pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya Salah satu elemen pentingnya adalah pemerintahan yang baik. Jika diterapkan dengan tepat, tata kelola yang efektif akan menghasilkan peningkatan kinerja aparat melalui akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum. Aparatur pemerintah akan berkinerja lebih baik jika terdapat tata kelola yang lebih baik struktur tata kelola yang efektif, manajemen memutuskan sejauh mana suatu lembaga pemerintah dapat melangkah. Penyelenggaraan negara yang andal merupakan landasan konsep *good governance* dalam pemerintahan. Pembangunan yang beretika dan pemerataan hasil pembangunan dapat diwujudkan melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan cara ini, setiap orang dapat memperoleh manfaat dari kemajuan dan kekayaan, sehingga pemerintah dapat mencapai tujuannya. Tata pemerintahan yang baik berasal dari dua kata bahasa Inggris: *governance* dan *good*. "Baik" mengacu pada penghormatan terhadap kemauan rakyat, independensi, unsur-unsur fungsional, dan pemerintahan yang efektif dan efisien, sedangkan "pemerintahan" mengacu pada semua prosedur, sistem, dan lembaga yang digunakan individu dan kelompok untuk menjalankan hak hukum mereka guna memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka dan mendamaikan perbedaan-perbedaan mereka. Upaya demokrasi yang dimulai pada tahun 1980an menyebar ke seluruh dunia pada tahun 1990an. Perspektif baru mengenai tata kelola, yang ditandai dengan bangkitnya tata pemerintahan dan tata pemerintahan yang baik, berkembang pada masa ini. Faktanya, para profesional pembangunan internasional dan organisasi donor seperti Bank Dunia dan IMF sudah mulai menetapkan konsep tata kelola dan tata kelola yang baik. telah

RESEARCH ARTICLE

diakui selama sekitar 120 tahun dalam ilmu politik dan literatur administrasi, khususnya oleh Woodrow Wilson, yang berusia 27 tahun ketika ia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Guna mewujudkan keinginan masyarakat tersebut tentunya banyak hal yang dapat dicapai melalui kinerja aparatur yang sadar akan adat istiadat dan nilai-nilai aparatur pemerintah yang memberikan praktik tata kelola yang baik. Agar setiap orang dapat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan pembangunan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik baik sesungguhnya mensyaratkan adanya perubahan yang menyeluruh pada seluruh aspek kelembagaan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi pemerintah sebagai wakil negara, pelaku pasar dan dunia usaha, serta masyarakat sipil. Transparansi mencakup penerapan perjanjian dan peraturan hukum secara jelas dan tepat. Produktivitas, efektivitas, dan efisiensi menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang mendukung cara-cara yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi tuntutan masyarakat harus digunakan untuk merancang dan menerapkan tata kelola yang baik. Pemanfaatan sumber Sementara akuntabilitas menunjukkan bahwa walaupun tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat mendasar, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan juga termasuk dalam produktivitas tata pemerintahan yang baik. Hal ini tidak hanya berlaku pada lembaga pemerintah dan perusahaan. Baik lembaga publik maupun swasta didorong untuk tunduk pada akuntabilitas karena adanya opini publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, peran pemerintah, yakni menjunjung tinggi nilai kejujuran, sangatlah penting, artinya kebutuhan yang semata-mata demi kepentingan masyarakat harus konsisten dengan konsep tata pemerintahan yang baik berbasis otonomi daerah, khususnya di Indonesia. Karena keterbukaan, efektivitas, efisiensi, dan kebebasan dari berbagai bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme masih belum sepenuhnya optimal, maka penerapan pemerintahan yang baik sangat sulit dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang sukses, perwakilan pemerintah desa dan daerah harus mematuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan fungsi *good governance* dalam pemerintahan. Teori *Agency theory* menjadi landasan gagasan penulis dalam penelitian "Pengaruh Penerapan *Good governance* Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa." Jensen dan Meckling menciptakan teori keagenan pada tahun 1976 dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan hubungan antara manajemen yang bertindak sebagai agen dan memberikan arahan kepada agen (prinsip). Ide dasar teori keagenan adalah bahwa manajer, atau agen, adalah individu dengan kepentingan mereka sendiri yang tidak tunduk pada kepentingan prinsipal atau wali amanat. Akibatnya, organisasi atau bisnis yang menganut teori keagenan berpendapat bahwa kontrak yang jelas antara prinsipal dan agen diperlukan untuk menunjukkan persetujuan para pihak. Biasanya, perjanjian tersebut menetapkan bahwa agen harus beroperasi demi kepentingan terbaik prinsipal. Kepentingan prinsipal dalam mengelola harta kekayaan prinsipal. Suatu pemerintahan juga dapat dilihat melalui kacamata teori keagenan, yang menggambarkan hubungan antara kepala dan agen (Pierce Jr., 1989). Sementara presiden adalah lembaga yang dipilih oleh rakyat, badan legislatif, yang juga dipilih oleh masyarakat umum, berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan penyeimbang kekuasaan. Hubungan ini menyatakan bahwa orang yang memberikan wewenang kepada pemerintah adalah rakyat. Melalui pemilihan umum, Presiden dan wakil DPR, DPD, dan DPRD mampu menguasai dan mengawasi sumber daya komunal dengan menggunakan kewenangan negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan pada *filosofis positivis* yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dari responden terhadap pernyataan dalam kuesioner di Kantor Pemerintah Desa, Kecamatan Tikala, Lembang Pangden, Kabupaten Toraja Utara. Data dan hasil tersebut kemudian dianalisis menggunakan program SmartPLS4 untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh penelitian ini.

RESEARCH ARTICLE

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Uji Model pengukuran (*Measurement Model/Outer Model*)

Model pengukuran adalah model yang dapat menggambarkan bagaimana variabel laten (konstruk) dan indikatornya berhubungan satu sama lain.

1) Uji Uji *Composite Reliability*

Nilai Keandalan Komposit (CR) diperiksa menggunakan ambang batas yang lebih besar dari 0,7 untuk melakukan pengujian ini.

Tabel 1. Hasil Uji Composite Reliability

	<i>Composite reliability</i>	Ket
Akuntabilitas (X1)	0,896	Reliabel
Transparansi (X2)	0,888	Reliabel
Partisipasi (X3)	0,941	Reliabel
Aturan Hukum (X4)	0,909	Reliabel
Kinerja (Y)	0,932	Reliabel

Tabel di atas menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dari reliabilitas komposit (uji reliabilitas), yang meliputi kinerja dengan angka 0,932, akuntabilitas X1 (0,896), transparansi X2 (0,888), partisipasi X3 (0,941), dan supremasi hukum X4 (0,909). Berdasarkan nilai reliabilitas komposit semua konstruk yang lebih besar dari 0,70, dapat ditentukan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat uji reliabilitas yang tinggi.

2) Uji *Average Variance Extracted (AVE)*

Nilai tersebut menggambarkan besarnya varian atau keragaman variabel manifes (indikator) yang dapat didukung oleh variabel laten (konstruk). Nilai AVE minimal 0,5 menunjukkan ukuran *converget validity*, yang baik dapat dilihat pada tabel dibawah tersebut:

Tabel 2. Hasil Uji Composite Reliability

Variabel	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,665	Valid
Transparansi	0,686	Valid
Partisipasi	0,795	Valid
Aturan Hukum	0,714	Valid
Kinerja	0,777	Valid

Dapat disimpulkan bahwa semua variabel memenuhi syarat penggunaan dan tidak menjadi masalah dalam uji AVE apabila nilainya lebih dari 0,5, berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas.

Tabel 3. Hasil Uji Signifikan (Uji t)

Variabel	sample (O)	mean (M)	Std. (STDEV)	t statistics (O/STDEV)	P values
Akuntabilitas -> Kinerja	0,026	0,049	0,113	0,227	0,821
Transparansi-> Kinerja	0,341	0,329	0,103	3,319	0,001
Partisipasi -> Kinerja	-0,029	-0,003	0,073	0,392	0,695
Aturan Hukum -> Kinerja	0,503	0,465	0,145	3,457	0,001

Berdasarkan hasil uji koefisieb jalur original sample akuntabilitas terhadap kinerja adalah 0,026, yakni berpengaruh positif yang berarti akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Diketahui P-Value 0.821 >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja.

RESEARCH ARTICLE

Namun penelitian (Rachman, 2021:44 dlm Putra Pratama *et al.*, 2024) mengatakan bahwa akuntabilitas memiliki dampak yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja. Sejalan dengan penelitian (Safrilul Ulum *et al.*, 2021) Hal ini karena masyarakat mungkin tidak menerima informasi keuangan yang akurat dari pemerintah, yang dapat merusak kepercayaan publik terlepas dari apakah akuntabilitas keuangan sudah ada atau belum. Koefisien jalur (sampel asli) transparansi terhadap kinerja memiliki nilai pengetahuan sebesar 0,341, yang diketahui positif, yang menunjukkan bahwa transparansi meningkatkan kinerja. Transparansi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja, seperti ditunjukkan oleh nilai -value sebesar $0,001 < 0,05$. Diketahui nilai koefisien jalur original sample aturan partisipasi -0,029 dengan nilai negatif dan nilai $0,695 > 0,05$ adalah nilai p-value. Hal ini menyiratkan bahwa tidak ada pengaruh moderasi pada hubungan antara keterlibatan dan kinerja. oleh variabel partisipasi. Namun, (Safrilul Ulum1 *at.al* 2021). Menurut penelitian, ada peluang untuk partisipasi masyarakat yang sesungguhnya melalui konsep atau ide, tetapi tingkat keterlibatan masyarakat tidak cukup untuk menggunakan temuan dan penilaian secara maksimal. Keterlibatan masyarakat secara keseluruhan merupakan salah satu variabel yang dapat dipicu oleh temuan tersebut. Diperkirakan bahwa keterlibatan masyarakat secara teratur akan menghasilkan pelatihan yang lebih jelas. Diketahui bahwa sampel awal aturan hukum memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,503, yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan sangat meningkatkan kinerja. Nilai p sebesar $0,001 < 0,05$ menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja.

Tabel 4. Hasil Uji -square-Overview

	R-square	R-square adjusted
Kinerja	0,662	0,650

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R-square), nilai R-square adj yang diketahui untuk variabel laten Y adalah angka yang menunjukkan sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. atau Kinerja adalah 0,650 berarti variabel bebas yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Aturan Hukum mampu menjelaskan kinerja.

3.1.2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Regresi Linear Berganda adalah Untuk memastikan derajat hubungan linier antara variabel independen dan dependen, analisis korelasi berganda digunakan. Untuk menetapkan hubungan kausal antara satu variabel dependen (Y) dan beberapa variabel independen (X), regresi berganda digunakan. Penelitian ini meneliti variabel-variabel yang memengaruhi kinerja variabel, independen yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Aturan Hukum.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

	Sum square	df	Mean square	F	P value
Total	1080,777	120	0,000	0,000	0,000
Error	374,701	116	3,230	0,000	0,000
Regression	706,076	4	176,519	54,647	0,000

Pada tingkat signifikansi 0,05, X1, X2, X3, dan X4 secara kolektif atau simultan mempunyai dampak yang substansial terhadap Y, karena nilai P diketahui sebesar $0,000 < 0,05$ atau 5%. Koefisien r-kuadrat, juga dikenal sebagai koefisien determinasi sederhana dan berganda, digunakan dalam regresi linier untuk menilai kinerja model dalam menyesuaikan atau mengadaptasi data. Dengan mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen

RESEARCH ARTICLE

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)

	Kinerja
R-square	0,653
R-square adjusted	0,641
Durbin-Watson test	1,782

Berdasarkan hasil uji R2 nilai koefisien determinasi (R square) dapat ditemukan pada tabel di atas sebesar 0,653 yang berarti variabel X1, X2, X3, dan X4 mampu menjelaskan varians variabel Y sebesar 65,3%. sisanya sebesar 23,1% dijelaskan oleh faktor lainnya.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang didapatkan dari hasil Kinerja (Y) dan penggunaan *good governance* yang baik (X) berkorelasi positif dan signifikan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan, (Mardiasmo, 2018 hl:44 Putra Pratama *et al.*, 2024). pengujian hipotesis pertama berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja, dengan nilai p-value 0,821, dan nilai t-tatistik 0,227 yang dinilai > 0,005 sejalan dengan penelitian (Susliyanti & Binawati, 2020) hal tersebut diakibatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memberikan akses publik terhadap data keuangan yang disampaikan pemerintah sehingga kepercayaan publik tidak terpengaruh oleh tanggung jawab keuangan. Namun berbeda dalam penelitian (Rachman, 2021 hl:44Putra Pratama *et al.*, 2024) yang menunjukkan bahwa kinerja tidak dipengaruhi oleh akuntabilitas. Temuan uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa transparansi secara signifikan meningkatkan kinerja, dengan nilai P sebesar 0,001 dan nilai t-statistik sebesar 3,319. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi baik maupun buruk mempengaruhi kinerja aparatur di Desa Pangden, Kabupaten Toraja Utara. Pemerintah Desa Pangden, Kabupaten Toraja Utara kini dapat memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan seluruh program dan kegiatannya berkat kemajuan zaman. Gagasan bahwa kebebasan informasi menjadi landasan bagi hal ini dari keterbukaan (Mardiasmo,2018;44 dalam Putra Pratama *et al.*, 2024).

Temuan ini sejalan dengan temuan sebelumnya (Rachman, 2021;44 dlm Putra Pratama *et al.*, 2024). yang menunjukkan bahwa kinerja dipengaruhi secara signifikan dan menguntungkan oleh transparansi. (Nurwana *et al.*, 2020:44 dalam (Putra Pratama *et al.*, 2024) mengklaim bahwa transparansi tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan variabel partisipasi tidak mendukung hipotesis penelitian ini sehingga negatif, dengan nilai P-value sebesar 0,595 dan nilai t-statistik sebesar 0,392 maka uji hipotesis ketiga negatif signifikan namun hal ini sesuai dengan penelitian. (Safrilul Ulum *at.*, al 2021., Putra Pratama *et al.*, 2024) Sejalan dengan penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa kemungkinan masyarakat berpartisipasi secara nyata melalui konsep atau ide, tetapi tingkat keterlibatan masyarakat dalam penerapan evaluasi dan hasil tidak cukup untuk membuatnya tampak sangat ideal. Keterlibatan masyarakat secara keseluruhan merupakan salah satu variabel yang dapat dipicu oleh temuan tersebut. Diperkirakan bahwa keterlibatan masyarakat secara teratur akan menghasilkan pelatihan yang lebih jelas. Berdasarkan hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa baik buruknya aturan hukum berpengaruh terhadap buruknya kinerja aparatur di Desa Pangden Kabupaten Toraja Utara yaitu memiliki kategori baik dengan nilai P-value sebesar 0,001 dan nilai t-statistik sebesar 0,457, menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. (p=0,001 dan t=3,457) bahwa baik buruknya aturan hukum berpengaruh terhadap kinerja aparatur, Pemerintah Desa Pangden dengan melakukan penegakan hukum apabila ada aparatur yang melakukan kesalahan maka Pemerintah Desa Pangden akan lebih baik dalam menegakkan hukum apabila ada aparatur yang melakukan kesalahan.(Yuniarsih dkk.,2021 :15 dalam Putra Pratama *et al.*, 2024) mengklaim bahwa penelitian telah menunjukkan bahwa hukum tidak berpengaruh pada kinerja karyawan.

4. Kesimpulan

Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap terhadap kinerja aparatur desa, transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur desa, partisipasi berpengaruh negatif terhadap kinerja aparatur desa, aturan Hukum berpengaruh positif terhadap aturan hukum terhadap kinerja aparatur desa. Di Desa Pangden, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan perundang-undangan terhadap tata kelola pemerintahan. Dengan nilai variabel Akuntabilitas (X1) 0,896, Transparansi (X2) 0,888, Partisipasi (X3) 0,941, Aturan Hukum (X4) 0,932 dan uji reliabilitas variabel Kinerja (Y) 0,932 artinya variabel *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja aparat pemerintah di Desa Pangden Kabupaten Toraja Utara yang semakin meningkat. Variabel Pada saat yang sama, kinerja aparatur pemerintahan desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penerapan *good governance* pemerintahan yang baik. Sejauh mana kinerja aparatur pemerintahan desa dipengaruhi oleh penerapan *good governance* pemerintahan yang baik adalah sebesar 65% yang dilihat dari nilai R-Square adj.

5. Referensi

- Addainuri, M. I., Abidin, M., & Suci, L. E. (2023). Analisis dampak governance terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(2).
- Burhanuddin, B., & Mamminanga, I. (2023). Pengaruh good governance terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 01–12. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i1.326>.
- Dumbi, R., & Dunggio, S. (n.d.). Penerapan good governance terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Bulila Kabupaten Gorontalo. *The Effect of Good Governance Implementation on Employee Performance at the Bulila District Office, Gorontalo Regency*.
- Holipah, S., Sos, M., & Si. (2022). Pengaruh prinsip-prinsip good governance terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sukaramikota Palembang. *Jurnal*, 17(2).
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan prinsip good governance terhadap aparatur desa dalam pelayanan publik di desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *Vol. 8*(Oktober).
- Koordinator, K., Perekonomian, B., Nasional, K., & Governansi, K. (n.d.). DRAF 26 Desember 2021 pedoman umum governansi sektor publik Indonesia (PUG-SPI).
- Kusumawati, R. E., & Yuliani, N. L. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa, good government governance, kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. *Borobudur Accounting Review*, 2(2).
- Nada, A. N., & Khoiriawati, N. (n.d.). Pengaruh good governance dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa pada Kecamatan Wonodadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10).
- Nainggolan, I. R. G., Lubis, P. K. D., Benediktus, R., & Simanjuntak, Y. (2024). Peran pengukuran kinerja sektor publik dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1.

RESEARCH ARTICLE

- Nurhidayat, S. T. I. S. (n.d.). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia (Vol. 1, Issue 1).
- Pratama, H. P., Teniro, A., Efendi, M., Zunafriesma, N., Studi Ilmu Administrasi Negara, P., & Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, F. (2024). Pengaruh variabel good governance terhadap kinerja aparatur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 8(1).
- Purnama Sari, R., Haryati, R., Lady Silvera, D., Author, C., Kunci, K., Aparatur Pemerintah Daerah, K., Keuangan Daerah, P., & Good Governance, P. (2023). Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan good governance (studi kasus di Kecamatan Koto Xi Tarusan). *EPJA*, 1(2). <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2>.
- Putri, N. A., & Yuliantoro, R. (2024). Pengaruh budaya organisasi, motivasi, pelatihan dan pengelolaan dana desa terhadap kinerja pemerintah desa berdasarkan persepsi aparatur desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan*, 2(2).
- Saputro, G. (2021). Pengaruh pengendalian internal dan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pegawai Kecamatan Tambaksari. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(9).
- Sirait, S. A., & Parhusip, P. T. (2022). Pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Silimakuta. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 1(2).
- Sirait, S. A., Lumban Gaol, R., & Parhusip, P. T. (2022). Pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Silimakuta. *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi (SMA)*, 1.
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 11(1).
- Tandibua', I., Idris, M., & Farida. (2024). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(2).
- Wafa, R., Basri, Y. M., & Desmiyawati, D. (n.d.). Studi empiris pada pemerintah desa di Kabupaten Pelalawan.